

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN BERSEPEDA DI
INDONESIA DAN NEGARA LAIN (STUDI
PERBANDINGAN INDONESIA, BELANDA, DENMARK,
DAN JEPANG)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata-1
pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas*

Oleh:

NURHATISYAH

1610921018

Pembimbing:

**Ir. HENDRA GUNAWAN, M.T
BAYU MARTANTO ADJI, Ph.D**



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

Abstrak

Sepeda merupakan transportasi darat yang digunakan untuk jarak dekat. Pada era 4.0 sekarang ini sepeda tidak hanya digunakan untuk transportasi saja namun bisa digunakan sebagai sarana olahraga, bahkan menjadi *trend* serta gaya hidup di kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, penggunaan sepeda pun semakin meningkat yang menyebabkan diterapkannya beberapa kebijakan bersepeda yang berfungsi untuk memberikan keselamatan serta memfasilitasi pengguna sepeda. Di Indonesia kebijakan bersepeda sudah ada dan diterapkan oleh pemerintah namun tidak semua kebijakan diterapkan dengan baik oleh pemerintah atau pun masyarakat Indonesia sendiri. Maka dari itu, diperlukan perbandingan kebijakan bersepeda dengan negara lainnya untuk mengetahui bagaimana perbedaan kebijakan bersepeda di Indonesia dan negara-negara lainnya yang terdiri dari Belanda, Denmark, dan Jepang. Tiga negara tersebut merupakan negara yang menjadikan sepeda sebagai kegiatan sehari-hari, dimana pengguna sepeda yang di Belanda mencapai 85% pengguna sepeda dengan jumlah sepeda 22,8 juta sepeda, di Denmark 80,1% dengan jumlah sepeda sebesar 4,5 juta sepeda, dan di Jepang 56,9% dengan jumlah sepeda sebesar 72 juta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana lebih mengutamakan kedalaman atau kualitas data, bersifat deksriptif, induktif, serta data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar. Dari penelitian ini didapatkan bahwa Indonesia dikatakan tertinggal dari Belanda, Denmark, dan Jepang. Kebijakan bersepeda di Indonesia dikatakan tertinggal dikarenakan terdapat beberapa kebijakan bersepeda di ketiga negara tersebut tidak diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan mengenai jembatan penyeberangan untuk pesepeda di Belanda. Terdapat dua faktor yang menyebabkan kebijakan bersepeda di Indonesia tertinggal, yaitu regulasi serta sosial dan budaya. Terdapat beberapa kebijakan bersepeda di Belanda, Denmark, dan Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kompensasi pajak, papan petunjuk khusus, layanan registrasi, gedung tempat parkir sepeda, denda, buku pedoman manual parkir sepeda, sistem *bike sharing*, jalur sepeda untuk olahraga dan hobi, anak-anak menggunakan helm, mendaftarkan sepeda, serta setiap toko menyediakan tempat parkir.

Kata Kunci: *perbandingan, kebijakan bersepeda, regulasi*